



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA KERJA (RENJA)



TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun kedepan dan untuk Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Penyusunan RENJA adalah sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun Anggaran Tahun 2020 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian RENJA Tahun 2020 Badan Kesatuan bangsa dan Politik disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan politik untuk tahun 2020. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik fikiran maupun informasi dalam penyusunan Renja Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Semoga RENJA ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Luwuk, 06 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI



Irpan Poma
Drs. IRPAN POMA, ME

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670615 198811 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAKAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai	14
2.3 Isu-isu Penting Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2020	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ..	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020	19
3.3 Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020	19
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

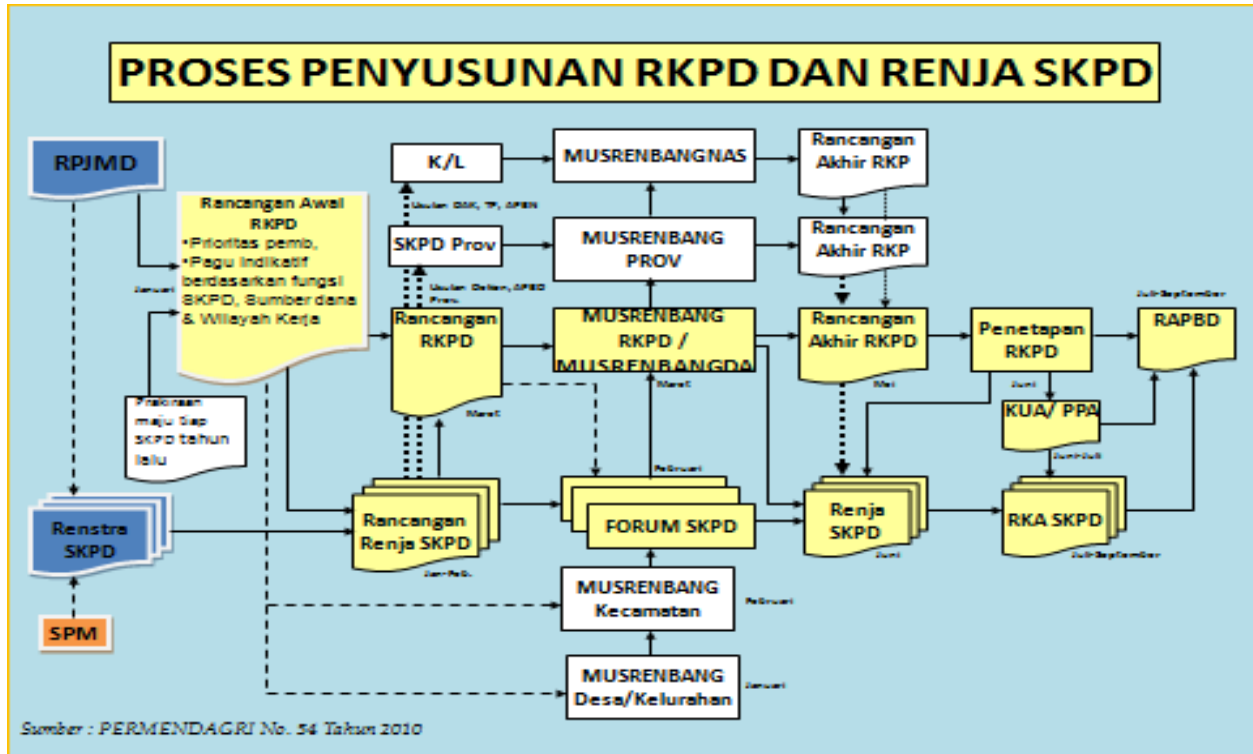
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, antara lain mengamanatkan untuk setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra SKPD).

Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Banggai diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan paradigma penyusunan Renja sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penyusunan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik peran dan fungsi strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi itulah diperlukan suatu dokumen rencana kerja yang menguraikan program dan kegiatan tahunan.

Adapun penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar 1).



Gambar 1.

Alur Penyusunan RKPd dan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Selain itu Proses penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Renstra, Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten Banggai.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).
 11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Banggai;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);
 13. Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2017 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Renja Badan Kesabangpol Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolak ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Bakesbangpol Kabupaten Banggai Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kabupaten Banggai Tahun lalu dan Capaian Renstra Bakesbangpol Kabupaten Banggai.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Banggai.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol Kabupaten Banggai.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020.

Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020
- 3.3. Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banggai Tahun lalu dan Capaian Renstra**

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja-OPD dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-OPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) OPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat outcome dan output.

Untuk lebih lengkap rincian hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2019 dapat di lihat pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun berjalan s/d Bulan Agustus 2019

Nama SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai

Lembar....dari

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	WAJIB										
1	19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
1	19	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pemanfaatan administrasi Perkantoran				100 %	100 %	100%	100 %
1	19	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000			300 Lembar	300 Lembar	100%	300 Lembar
					Jumlah Materai 6000			500 Lembar	500 Lembar	100%	500 Lembar
1	19	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Jaringan Listrik			1 Jaringan	1 Jaringan	100%	1 Jaringan
					Jumlah Jaringan Telepon			1 Jaringan	1 Jaringan	100%	1 Jaringan
					Jumlah Jaringan Internet			1 Jaringan	1 Jaringan	100%	1 jaringan
					Jumlah Jaringan Air			1 Jaringan	1 Jaringan	100%	1 Jaringan
1	19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih			12 Jenis	12 Jenis	100%	14 Jenis
1	19	01	10	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK			32 Jenis	32 Jenis	100%	32 Jenis
1	19	01	11	penyediaan barang cetakan dan	Jumlah Penggadaan			16000	16000	100%	24.000

Nama SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai

Lembar....dari

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
	penggandaan	dan Foto Copy			Lembar	Lembar		Lembar			
		Jumlah Cetakan			3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis			
1	19	01	17	Penyediaan makan dan Minuman	Jumlah Makanan	200 Dos	200 Dos	100%	400 Dos		
					Jumlah Minuman	200 Dos	200 Dos	100%	800 Dos		
1	19	01	18	Rapat- rapat Kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah	24 Laporan	24 Laporan	100%	8 Laporan		
1	19	01	22	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	12 Orang	12 Orang	100%	15 Orang		
1	19	01	29	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231 Laporan	231 Laporan	100%	208 Laporan		
1	19	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100%	100 %		
1	19	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat	8 Unit	8 Unit	100%			
1	19	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	4 Jenis	4 Jenis	100%	1 Jenis		
1	19	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100%	2 Jenis		
1	19	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis		
1	19	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit		
1	19	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang di Pelihara	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
					Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang di	17 Unit	17 Unit	100%	8 Unit		

Nama SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai

Lembar....dari

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Peliharaan									
1	19 02 26	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang di Peliharaan		1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis			
1	19 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Jumla Peralatan Kantor yang di Pelihara		2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis			
1	19 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Kepatuhan Disiplin ASN		100 %	100 %	100%	100 %			
1	19 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya		40 Pasang	40 Pasang	100%	32 Pasang			
1	19 03 05	Pangadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu		80 Pasang	80 Pasang	100%	92 Pasang			
1	19 04	PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS	Presentase Failitas Pindah/Purna Tugas ASN		100 %	100 %	100%	100 %			
1	19 04 01	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun		1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang			
1	19 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Presentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		100 %	100 %	100%	100 %			
1	19 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang Terlatih,Lulus dan Bersertifikat					2 Orang			
1	19 05 06	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Laporan		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen			
			Jumlah ASN yang diBina		32 Orang	32 Orang	100%	32 Orang			
1	19 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan,		100 %	100 %	100%	100 %			

Nama SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai

Lembar....dari

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
		Penggaran, Kinerja dan Keuangan										
1	19	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
1	19	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	
1	19	06	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SPPD			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	
1	19	17		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN								
1	19	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama			225 Orang	225 Orang	100%	150 Orang	
1	19	17	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat			375 Orang	375 Orang	100%	150 Orang	
1	19	17	08	Fasilitasi dan peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan di Kab. Banggai	Jumlah Kegiatan Rapat Forum			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%		
					Jumlah Peserta Sosialisasi FPK			150 Orang	150 Orang	100%	4 Kegiatan	
1	19	17	09	Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda	Jumlah Peserta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda			150 Orang	150 Orang	100%	70 Orang	
1	19	17	12	Pelatihan Peningkatan Wawasan	Jumlah Peserta			250 Orang	250	100%	150 Orang	

Nama SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai

Lembar....dari

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
	Kebangsaan	Pelatihan Peningkatan Wawasan Kebangsaan				Orang					
1	19	18									
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
1	19	18	02								
	Seminar, Talk Show/Coffee Morning, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta Seminar, Talk Show/Coffee Morning, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan									
						200 Orang	200 Orang	100%	140 Orang		
1	19	19									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Presentase Penganganan tidak menjadi Konflik									
1	19	19	02								
	Penyuluhan Aparat Desa/Kelurahan dan Anggota BPD	Jumlah peserta Penyuluhan Kamtibmas aparat desa/Kel. Dan anggota BPD									
						225 Orang	225 Orang	100%	85 Orang		
1	19	19	07								
	Kelancaran Kegiatan Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah Laporan Hasil Rapat dan Pemantauan									
						13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen		
1	19	19	09								
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Kegiatan rapat FKDM									
									34 Orang		
1	19	19	10								
	Koordinasi Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi penanganan konflik didaerah									
						4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan		
1	19	19	11								
	Pemantauan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing di Daerah	Jumlah Laporan PemantauanKegiatan Orang Asing, Tenaga kerja asing, dan Lembaga asing didaerah									
						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

Nama SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai

Lembar....dari

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 19 20	PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT	Presentase cakupan pelaksanaan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			100 %	100 %		100 %			
1 19 20 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman	Jumlah Peserta penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba			150 Orang	150 Orang	100%	50 Orang			
1 19 21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Presentase Pendidikan Politik Masyarakat			100 %	100 %		100 %			
1 19 21 01	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan			225 Orang	225 Orang	100%	150 Orang			
1 19 21 02	Operasional Kelancaran Tim Pertimbangan Kelayakan Bantuan Keuangan Kepada Parpol	Peresentase Partai Politik Penerima Bantuan yang Menglokasikan 60% untuk Pendidikan Politik			100%	100%	100%	100%			
1 19 21 08	Pemantapan Etika Budaya Politik	Jumlah Peserta Pemantapan			150 Orang	150 Orang	100%	70 Orang			
1 19 21 09	Monitoring Evaluasi Kondisi Politik dan Pemetaan data base parpol di daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan data base Parpol			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
1 19 24	PROGRAM PEMBERDAYAAN KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Presentase jumlah Organisasi Keagamaan, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan yang aktif			60 %	60 %	100%	65 %			
1 19 24 01	Operasional Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Jumlah Kegiatan Rapat PAKEM			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan			
1 19 24 02	Fasilitasi dan Peningkatan Forum	Jumlah Kegiatan Rapat			4 Kegiatan	4	100%	4 Kegiatan			

Nama SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai

Lembar....dari

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
	Kerukunan Umat Beragama	FKUB				Kegiatan					
1	19	24	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Data Base Ormas	Jumlah Dokumen Database Ormas			1 Laporan	1 Laporan		
1	19	24	04	Pembinaan Peningkatan Peran LSM, Ormas dan OKP	Jumlah Peserta Pembinaan				50 Orang		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017(thn n-2)	Tahun 2018(thn n-1)	Tahun 2019(thn n)	Tahun 2020(thn n+1)	Tahun 2017(thn n-2)	Tahun 2018(thn n-1)	Tahun 2019(thn n)	Tahun 2020(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Niat Akuntabilitas Kinerja			C	B	BB	BB	C	B	BB	BB	
2	Angka Konflik IPOLEKSOSB UDHANKAM			0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	
3	Angka Konflik SARA di Masyarakat			0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	
4	Persentase DPT yang Menggunakan Hak Pilih			73 %	73 %	80 %	85 %	73 %	73 %	80 %	85 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan suku, budaya dan agama sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Banggai, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai, yaitu :

1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari belum maksimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada serta masih adanya konflik-konflik dan demonstrasi yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilukada.

2. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Krisis kepercayaan

terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi dan penutupan jalan.

3. Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Usulan program dan kegiatan hasil MUSRENBANG tahun 2020 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai pada rencana kerja Tahun 2020 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan. Usulan yang langsung di dapat dari masyarakat yakni kesbangpol diharuskan untuk dapat mewujudkan rasa aman dan harmonis di masyarakat, dapat memberikan pendidikan politik pada masyarakat serta memperteguh kebhinekaan dan rasa cinta tanah air.

Rincian rewiuw terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kabupaten Banggai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat di lihat pada lampiran Tabel TC.31

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel.T-VI.C.11
Identifikasi Kebijakan Nasional
Kabupaten Banggai

No	Kebijakan Nasional	sumber	keterangan
1.	Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik	Rancangan Awal RKP 2018 (Bapenas)	
2.	Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik	Rancangan Awal RKP 2018 (Bapenas)	
3.	Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Rancangan Awal RKP 2018 (Bapenas)	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Banggai Yang Harmonis, Demokratis dan Kondusif

2. Sasaran

- a. Meningkatkan Tata Kelolah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Baik, Bersih dan Akuntabel
- b. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Tentang Nilai-nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politiknya

3.3. Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2016-2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai menetapkan sejumlah Program dan Kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Adapun uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan berupa :
 - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 1.4. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
 - 1.5. Penyediaan Alat tulis Kantor
 - 1.6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
 - 1.7. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.9. Penyediaan makanan dan minuman

- 1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
- 1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 1.12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan berupa :
 - 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2.4. Pengadaan Meubelair
 - 2.5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - 2.6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
 - 2.7. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
 - 2.8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 3.2. Pengadaan Pakaian KORPRI
 - 3.3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program fasilitas pindah / purna tugas PNS dengan kegiatan berupa :
 - 4.1. Pemulangan pegawai yang pensiun
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan berupa :
 - 5.1. Pendidikan dan pelatihan formal
 - 5.2. Pembinaan dan pemantauan Kerja Aparatur
6. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan berupa :
 - 6.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 6.2. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
 - 6.3. Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun
 - 6.4. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
7. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan berupa :
 - 7.1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan Masyarakat
 - 7.2. Fasilitasi dan Peningkatan Forum Pembauran kebangsaan dikab. Banggai
 - 7.3. Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat, Tokoh gama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda
 - 7.4. Pelatihan peningkatan Wawasan Kebangsaan

8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan berupa :
 - 8.1 Penyuluhan aparat desa / kel. dan anggota BPD
 - 8.2 Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah
 - 8.3 Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah
 - 8.4 Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing di Daerah
 - 8.5 Kelancaran kegiatan Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA)
9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - 9.1 Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
10. Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan berupa :
 - 10.1 Penyuluhan kepada masyarakat
 - 10.2 Operasional kelancaran tim pertimbangan kelayakan bantuan keuangan kepada Parpol
 - 10.3 Pemantapan Etika Budaya Politik
 - 10.4 Monitoring Evaluasi dan Pemetaan Database Parpol Di daerah
11. Program Pemberdayaan Ketahanan Seni budaya dan agama:
 - 11.1 Operasional Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - 11.2 Fasilitasi dan Peningkatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)
 - 11.3. Monitoring, evaluasi dan penyusunan Data Base Ormas
 - 11.4. Pembinaan Peningkatan Peran LSM, Ormas dan OKP.

Penjelasan rincian program Kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2020. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2020 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2020, dimana Renja Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

Lampiran-Lampiran